

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam ( S.E )

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**MARLENA ANGGRAINI**

**NPM : 1551010229**

**Jurusan : Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2021 M**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam ( S.E )

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Madnasir,S.E.,M.S.I.

Pembimbing II : Zuliansyah,S.Si.,M.M.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2021 M**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS)**

**ABSTRAK**

Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang melanda negara ini baik di tingkat pusat maupun di daerah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 mencapai 9,66% dari total penduduk Indonesia. Dengan adanya program pemerintah yaitu kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang. Melalui KUBE masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menemukan dan meriview bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menemukan dan mengetahui bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus). Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah bahwa program KUBE yang diadakan Pemerintah Tanggamus khususnya untuk Kecamatan Kelumbayan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan padahalnya program tersebut dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan Program KUBE di Kecamatan kelumbayan, dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam sudah sesuai dengan ajaran Islam karena sudah terpenuhinya keadilan seperti pemilihan anggota kelompok KUBE rata-rata termasuk kriteria fakir miskin dan berpenghasilan rendah. Program KUBE ini memiliki pengaruh yang positif dalam mensejahterakan masyarakat terbukti dengan adanya tambahan modal untuk usaha serta mengajak masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa yang lebih maju.

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S.Al-Insyirah, ayat 6-8)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan ridho-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Muzakkir dan Ibunda Nurmujiatun, yang sangat saya hormati dan saya cintai. Selalu menguatkanmu dengan sepenuh hati, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luarbiasa, dan selalu mendo“akanku agar terus dalam jalan-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Suamiku tercinta dan anakku yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam menjalani setiap langkahku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.
4. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Marlana Anggraini, dilahirkan di Kulon Progo 20 Maret 1997. Anak pertama dari dua bersaudara ,dari pasangan bapak Muzakkir dan ibu Nurmujiatun bertempat tinggal di Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

1. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Pekon Susuk selesai tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kelumbayan selesai tahun 2012.
3. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Ambarawa Pringsewu selesai tahun 2015.
4. Melanjutkan pendidikan tingkat tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN RadenIntan Lampung dimulainya tahun 2015.



**Bandar Lampung,**

**Marlena Anggraini**  
**NPM: 1551010229**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus)” dapat terselesaikan, shalawat serta salam dalam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW, para sahabat dan pengikut - pegikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I, selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam yang selalu memberikan dukungan kepada mahaiswanya.
4. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I, (Pembimbing I) dan Bapak A Zuliansyah, S.Si.,M.M (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing yang senantiasa

memberikan masukan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Sahabat seperjuanganku Ekonomi Islam kelas E yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan hingga proses skripsi.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi .....	27
1. Pengertian Strategi .....	27
2. Syarat-syarat Strategi.....	28
3. Manfaat Strategi.....	27
B. Kebijakan Pemerintah .....	29
1. Pengertian Kebijakan Pemerintah.....	29
2. Unsur dan Dimensi Kebijakan Pemerintah.....	31
3. Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	35
C. Kesejahteraan Masyarakat .....	37
1. Pengertian Kesejahteraan.....	37
D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	39
E. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam .....	42
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam.....	42
F. Indikator Kesejahteraan menurut Islam .....	48
G. Tinjauan Pustaka .....	50

### BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

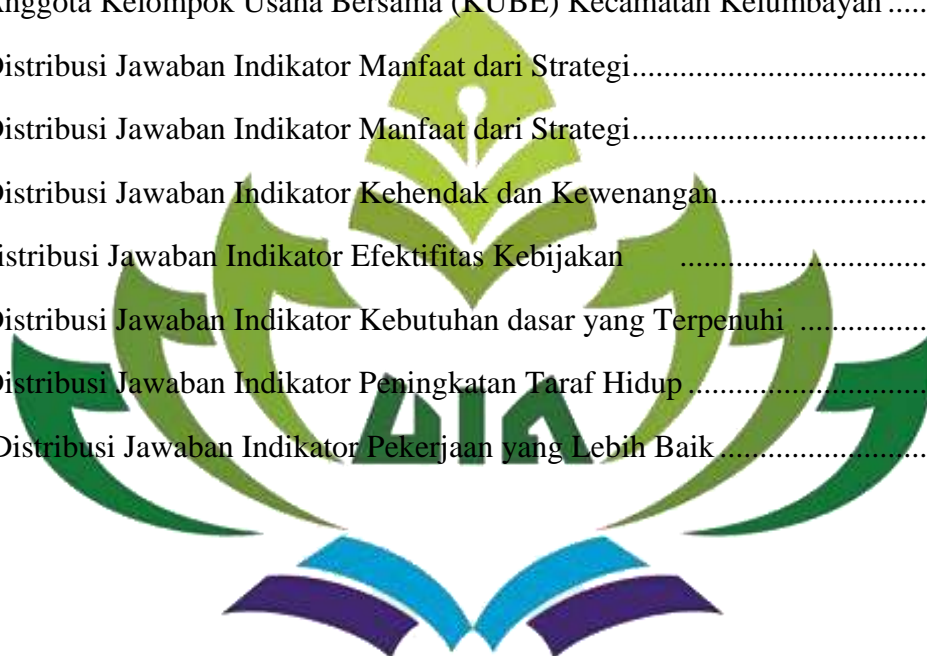
A. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus .....	57
1. Keadaan Geografis.....	57
2. Keadaan Iklim .....	61
3. Keadaan Demografi .....	61
B. Struktur Ekonomi .....	62
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	62

2. PDRB Perkapita .....	63
C. Keadaan Sektoral Kabupaten Tanggamus .....	64
1. Sektor pertanian .....	64
2. Sektor Perkebunan .....	65
3. Sektor perikanan .....	66
D. Gambaran KUBE di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.....	67
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kelumbayan .....	67
2. Visi dan Misi Kelompok Usaha Bersama.....	71
3. Tujuan Kelompok Usaha Bersama .....	71
4. Struktur Kepengurusan .....	72
E. Data Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus .....	75
1. Manfaat dari Strategi Pemerintah .....	75
2. Tersedianya Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.....	76
3. Kehendak dan Kewenangan.....	78
4. Efektifitas Kebijakan.....	80
F. Data Kesejahteraan masyarakat Tanggamus.....	80
1. Kebutuhan yang Terpenuhi.....	81
2. Peningkatan Taraf Hidup.....	83
3. Pekerjaan yang Lebih Baik .....	84
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	87
B. Implementasi Strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	90
C. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	102
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Tabel Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2013-2017 .....	11
1.2 Tabel Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 .....	12
1.3 Tabel Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di KabupatenTanggamus Tahun 2013-2017 .....	13
1.2 Penduduk Dan Angka Kemiskinan Kcamatan Kelumbayan .....	14
3.1 Wilayah kecamatan Kabupaten tanggamus .....	60
3.2 Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Kelumbayan .....	70
3.4 Distribusi Jawaban Indikator Manfaat dari Strategi.....	78
3.5 Distribusi Jawaban Indikator Manfaat dari Strategi.....	79
3.6 Distribusi Jawaban Indikator Kehendak dan Kewenangan.....	81
3.7 Distribusi Jawaban Indikator Efektifitas Kebijakan .....	82
3.8 Distribusi Jawaban Indikator Kebutuhan dasar yang Terpenuhi .....	84
3.9 Distribusi Jawaban Indikator Peningkatan Taraf Hidup .....	85
3.1 Distribusi Jawaban Indikator Pekerjaan yang Lebih Baik .....	85



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS)**. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. **Strategi** adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang diancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>1</sup>
2. **Kebijakan** adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam:

---

<sup>1</sup>Jauch Lawrence R. & Glueck William F, *Manajemen Dan Strategi Kebijakan Perusahaan*. (Jakarta: Erlangga 1989), hlm 9

(1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan

(2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.<sup>2</sup>

**3. Pemerintah Kabupaten** adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah kabupaten (pemkab) dipimpin oleh seorang bupati<sup>3</sup>

**4. Upaya** adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>4</sup>

**5. Meningkatkan** adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.<sup>5</sup>

**6. Kesejahteraan** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) hlm 22

<sup>3</sup>Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm 30

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*<http://www.kbbi.web.id/usaha>, 30 Januari 2020

<sup>5</sup>Peter salim dan yeni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Press, 1995), hlm 160.

<sup>6</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 2009

**7. Masyarakat** adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.<sup>7</sup>

**8. Persepektif** adalah suatu kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.<sup>8</sup>

**9. Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.<sup>9</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian terhadap strategi dan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelumbayan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup>Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993) hlm 38

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta:Gramedia, 2011), hlm 1062

<sup>9</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) ,*Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm 19.

## 1. Alasan Objektif

Daerah Kabupaten Tanggamus khususnya di Kecamatan Kelumbayan pada umumnya masih memiliki pendapatan ekonomi yang minim. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Strategi dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan salah satu upaya untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Strategi dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini ada adalah mengadakan program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif. Akan tetapi program ini belum berjalan dengan baik, dan belum maksimal dijalankan

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini untuk melihat bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam khususnya di kecamatan kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Mengingat literatur dan bahan informasi yang di perlukan cukup menunjang dan relevan dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan

Ekonomi Syari;ah. Serta tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan data maupun literatur yang cukup memadai berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun sekunder.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang melanda negara ini baik di tingkat pusat maupun di daerah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 mencapai 9,66% dari total penduduk Indonesia.<sup>10</sup> Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat taraf hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (*developed countries*). Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang akan menjadi kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya, pembangunan ekonomi selalu berkaitan terutama dengan efesiensi dan alokasi sumber-

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015



sumber produktif yang langka dengan pertumbuhan yang optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar<sup>11</sup>.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia telah membawa kemajuan secara umum dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Prioritas utama pemberdayaan masyarakat miskin adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi (modal manusia). Pendidikan merupakan ramuan utama dalam pengurangan kemiskinan. Dengan pendidikan itu masyarakat miskin menjadi produktif yang mengantarkan pada perolehan dan peningkatan pendapatan. Menurut Bank Dunia pendidikan menjadi sentral bagi pembangunan dan sebuah kunci mencapai tujuan Pembangunan Milenium yang menempatkan pendidikan dasar dalam tujuan pengurangan kemiskinan untuk tindakan yang disepakati bersama selama beberapa tahun mendatang. Pendidikan merupakan factor paling efektif untuk mengurangi masyarakat miskin, yang

---

<sup>11</sup>Suryana, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : 2000), hlm 2

memungkinkan mereka mampu mengkreasi dunia secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Kebijakan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Salah satu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan selalu diupayakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun pada realitanya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan serta dalam bidang kesehatan pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Dengan adanya program pemerintah yaitu kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui KUBE masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk

---

<sup>12</sup> Rulam Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2012), hlm 16-31

digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang. Melalui KUBE masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sesuai dengan ketentuannya KUBE merupakan kumpulan orang-orang kurang mampu yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu contoh daerah yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Permasalahan penduduk miskin diantaranya jumlah penduduk miskin masih relative tinggi, kemampuan sumber daya dan meterampilan penduduk miskin sangat terbatas, kesehatan dan gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan keluarga miskin menyekolahkan anak terbatas.

**Tabel 1.1**

**Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Indonesia**

**Tahun 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin
2013	275.779	28,55	11,47
2014	286.079	27,73	10,96
2015	333.034	28,51	11,13
2016	350.420	27,76	10,70

2017	370.910	26,58	10,12
------	---------	-------	-------

*Sumber: BPS,2018*

**Tabel 1.2**

**Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung**

**Tahun 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin
2013	295.395	1.144	14,39
2014	318.821	1.143	14,21
2015	337.996	1.163	14,35
2016	364.922	1.169	14,29
2017	384.882	1.131	13,69

*Sumber: BPS Provinsi Lampung,2016*



**Tabel 1.3**

**Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tanggamus**

**Tahun 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk	Persentase penduduk

		Miskin	Miskin
2013	287.56	85.639	15.24
2014	299.051	85.019	14.95
2015	309.569	81.560	14.26
2016	332.302	81.340	14.05
2017	341.443	77.530	13.25

*Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus, 2016*

Jumlah dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus tahun 2013 sebesar 85.639 ribu jiwa atau 15,24% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga 2017 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 77.530 ribu jiwa atau 13,25%.

Sumber daya alam yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap wilayah belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Terbukti dengan masih relative tingginya angka kemiskinan dan berdasarkan data Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Tanggamus masih menyisakan sebanyak 28 desa tertinggal.

Berikut ini merupakan data kemiskinan salah satu daerah di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017. Data ini disajikan sebagai pandangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Tanggamus:

**Tabel 1.4**

### Penduduk Dan Angka Kemiskinan Kecamatan Kelumbayan

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kemiskinan (KK)
2013	10.918	2.701
2014	10.831	2.727
2015	10.830	2.727
2016	10.822	2.724
2017	10.822	2.724

Sumber : Diolah daridata BPS

Pemerintah telah banyak melakukan program penanggulangan kemiskinan bahkan telah terbentuk suatu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk menyelesaikan permasalahan ini,<sup>13</sup> namun nyatanya dengan meningkatnya jumlah penduduk angka kemiskinan juga ikut terus meningkat. Penanggulangan kemiskinan saat ini dilakukan dengan mengupayakan kebijakan atau program anti kemiskinan yang dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan.

Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan, pengorganisasian, dan program yang tepat. Secara khusus upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk memajukan daerahnya yaitu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat

<sup>13</sup> Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta :UPP STIN YKPN,2012).h.

melalui program bantuan sosial (program keluarga harapan), program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus yaitu:

- a. Jumlah anggota keluarga yaitu karena menggambarkan beban keluarga. Pertambahan penduduk sebagai akibat dari tingginya kelahiran menyebabkan beban hidup keluarga semakin berat.
- b. Pendidikan, kualitas sumber daya manusia seseorang bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan yang rendah menggambarkan kualitas sumber daya manusianya juga rendah, begitu sebaliknya.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi ini memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhana kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomi, dan kemandirian adalah keberdayaan. Semangat islam dalam kemandirian dapat di jumpai dalam Q.S. Al-Ma'uun 107:1-3, sebagai berikut.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

(٣)

*Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Ma'uun 107:1-3)*

Penjelasan dari ayat diatas adalah orang kaya yang tidak menyantuni yatim dan fakir miskin ekuivalen dengan orang miskin yang tidak berjuang dengan terus menerus untuk meraih kemandirian ekonomis. Kewajiban kaum mempunya untuk membayar zakat, anjuran untuk bersedekah, wakaf, dan kewajiban untuk memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi merupakan petunjuk Islam paling jelas terhadap etos kewirausahaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- b. Bagaimana implementasi strategi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- c. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam?



## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menemukan dan meriview bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk menemukan dan mengetahui bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

### **2. Manfaat penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Selanjutnya akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi

kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>15</sup>

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.<sup>16</sup> Penelitian *field research* dikerjakan dengan

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm.112

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

<sup>16</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 142.

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus).

Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### **b. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumeen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari masyarakat yang berada di beberapa desa di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus).

### b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

### c. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah “*Field research*” yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya namun tidak hanya itu, tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuhan bahkan kendaraan sejenisnya.<sup>21</sup>

Rumus Slovin digunakan untuk mendapatkan banyaknya sampel dalam survei yang bertujuan untuk mengestimasi proporsi dan kita tidak mengetahui perkiraan dari proporsi populasi tersebut yang merupakan dasar penghitungan varian.

Rumus Slovin karena tidak membutuhkan perkiraan nilai proporsi populasi. Rumus Slovin telah langsung menetapkan nilai proporsi, dimana nilai proporsi yang ditetapkan adalah nilai proporsi yang menghasilkan nilai varian tertinggi

Dalam menetapkan besarnya sample (*sample size*) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut:<sup>22</sup>

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

<sup>22</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 146.

Keterangan :

$n$  : Ukuran Sampel

$N$  : Ukuran Populasi

$e$  : Persen Kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 10%

Adapun populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah masyarakat atau warga dari beberapa desa yang berada di kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang menerima bantuan KUBE dari pemerintah yaitu berjumlah 150 orang.<sup>23</sup> Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari warga kecamatan Kelumbayan, maka :

$$n = \frac{150}{1+150(0,1)^2} = 60$$

Dengan demikian, jumlah sampel untuk warga di Kecamatan Kelumbayan yang menerima bantuan KUBE adalah 60 orang. Untuk menggunakan ukuran sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPK) pada tanggal 17 Februari 2018.

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>24</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada beberapa desa yang berada di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.<sup>26</sup>Metode *Interview* yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

---

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 118.

<sup>25</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 203.

<sup>26</sup>Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 163

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.<sup>27</sup>

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah beberapa warga desa dari Kecamatan Kelumbayan dan beberapa staf dari Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini penulis akan memasukan beberapa data berupa laporan statistik tahunan yang didapat dari Badan Pusat Statistik kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggaus, wawancara terhadap staf di Dinas Sosial yang berada di

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 64

<sup>28</sup> Koentjoroningrat, "Metodologi Penelitian Masyarakat", (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 46.



Kabupaten Tanggamus, lalu keterangan yang didapat dari masyarakat Kecamatan Kelumbayan.

#### **d. Kuisisioner**

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>29</sup> Dengan cara melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk pertanyaan kepada responden terkait dengan kualitas dan kuantitas desa atau warga sehingga responden dapat memberikan jawaban atas pertanyaan secara tertulis.

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam khususnya di beberapa desa di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus

#### **4. Pengolahan Data dan Analisis**

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan

---

<sup>29</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 83.

pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang strategi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

**a. Editing**

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

Data yang penulis ambil tentang strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam yang diterapkan oleh Pemerintah Tanggamus. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

**b. Organizing**

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>31</sup>

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah *editing*, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada beberapa desa di Kecamatan Kelumbayam Kabupaten Tanggamus. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang strategi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### *c. Analyzing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>32</sup>

Hasil yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 195

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.<sup>33</sup>

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis strategi dan kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.



---

<sup>33</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), hlm. 300.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Menurut George Stainner dan Jhon Minner strategi adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>34</sup>

Sedang menurut Stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono dalam buku Husein Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>35</sup>

Menurut Quinn Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun

---

<sup>34</sup> George Steinner, Jhon Minner, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20

<sup>35</sup> Husein Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31.

berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara bertindak untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi berdasarkan pada penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

## 2. Syarat-syarat Strategi

Suatu perencanaan agar berjalan dengan sesuai sasaran dan bias diterapkan secara efektif atau efisien. Maka terdapat syarat penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi menurut Sondang P. Siagian, yaitu:<sup>37</sup>

1. Strategi harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dan berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul, dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif, atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
2. Strategi harus diperhitungkan secara realistis kemampuannya, suatu organisasi dalam menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategitersebut.
3. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak

<sup>36</sup> Cameron and Quinn (1999) *diagnosing and changing organizational culture Based on the competing values framework*, Addison Wesley Mass:Reading

<sup>37</sup>Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hlm .102

ukur tepat atau tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, namun juga mencakup operasional ataupun pelaksanaannya.

### 3. Manfaat Strategi

Dalam menentukan suatu strategi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang akan dicapai dimasa mendatang. Setiap strategi dalam organisasi baik pemerintah maupun swasta tentu memiliki manfaat yang sesuai dengan harapan. Manfaat dari penetapan strategi pada organisasi yakni, suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa mendatang dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini agar mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar memiliki partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interelasi.<sup>38</sup>

### 4. Tahapan-Tahapan Strategi

Menurut Blanchard mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 206

meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.<sup>39</sup>

Definisi tersebut memandang keterlibatan masyarakat mulai tahapan-tahapan strategi yang dibuat oleh pemerintah seperti :

- 1) Pembuatan keputusan
- 2) Penerapan keputusan
- 3) Penikmatan hasil
- 4) Evaluasi

pengertian pemberdayaan masyarakat seringkali dipahami sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat dalam program yang sering dipahami sebagai bentuk partisipasi, maksudnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi dalam konteks ini diartikan sebagai mengikutsertakan masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya,

## **B. Kebijakan Pemerintah**

### **1. Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan ditulis dalam bahasa inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa inggris dengan *wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di

---

<sup>39</sup> Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hl .809



bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan secara empiris.<sup>40</sup>

Thomas R. Dye dalam bukunya yang terkenal *introducing public policy* mengatakan bahwa kebijakan negara adalah “*whatever government choose, to do or not to do*”, artinya kebijakan negara adalah apapun yang di ambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Maka, kalau melakukan sesuatu menjadi keputusan, maka tidak melakukan apa-apa sama sekali pun adalah keputusan, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dapat saja mencegah segala sesuatu seperti kebakaran, pencurian, perjudian, dan berbagai kriminalitas, dan apabila hanya diam akan dianggap sengaja melindunginya untuk maksud materialistik<sup>41</sup>.

Tentang konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep yang di terminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti cinta kebenaran. Konsep “kebijaksanaan” menurut Budiardjo dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan.<sup>42</sup>

Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep kebijakan yang dikemukakan Mustopadidjaja. Uraian demikian

---

<sup>40</sup>Inu Kencana Syafie & Welasari, *Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm 126

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 130

<sup>42</sup>Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm 7.

memberikan arahan berpikir bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti adanya keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti adanya kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga asosiasi, terlepas darimana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui proses demokratisasi.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.<sup>43</sup>

## 2. Regulasi Kebijakan

Menurut George. J. Stigler dalam Mandala Harefa, regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm 9

dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.<sup>44</sup>

Regulasi dari Kebijakan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Salah satu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

---

<sup>44</sup> Kanaidi, *Koperasi dan UMKM*, (Bandung: Sarijadi, 2014), hlm. 46

Strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan selalu diupayakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun pada realitanya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan serta dalam bidang kesehatan pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

### **3. Unsur dan Dimensi Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik.

Secara konseptual, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini menunjukkan bahwa adanya kandungan empat unsur dalam pokok-pokok kebijakan yaitu adanya: (1) usaha; (2) Tujuan; (3) Sarana; dan (4) waktu.

Unsur usaha dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha dimana bisa dilakukan dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat ataupun gagasan. Suatu pernyataan kehendak yang dilakukakan atas dasar pengaturan tertentu dapat diwujudkan

melalui tindakan yang tertuang dalam berbagai tindakan yang tertuang dalam berbagai keputusan-keputusan hukum dan dapat pula melalui pemikiran yang dituangkan kedalam kerangka konsep dari suatu peraturan.

Unsur tujuan sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat berbuat karena kekuasaan yang dimilikinya dan kekuasaan itu berada dalam wilayah yang disebut kedaulatan suatu daerah atau negara. Pada zaman modern pemerintah dalam penyelenggaraan haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat (publik interest) dan karena itu pula pemerintah dalam melakukan kebijakan haruslah berorientasi pada tujuan.

Tentang unsur sarana, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain tentang besar atau luasnya sarana dibandingkan dengan tujuan yang dicapai. Jika sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan pertimbangan rasional. Hal yang menyangkut jenis sarana, seperti sarana dalam pemerintahan umum dari yang terkecil hingga yang terbesar, dapat disebutkan seperti: subsidi, anggaran, perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang bersangkutan paut dengan ketahanan dalam peperangan.

Unsur waktu adalah dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan atau upaya yang dilakukan. Waktu dalam isi kebijakan selalu

berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.<sup>45</sup>

Keempat unsur yang disebutkan diatas dapat dijadikan sebagai kriteria dalam menempatkan konsep kebijakan dalam berbagai dimensi seperti dimensi pemerintahan dalam kebijakan pemerintahan, dimensi sosial dalam kebijakan sosial, dimensi politik dalam kebijakan politik.

Dimensi pemerintahan menyebabkan kebijakan itu disebut kebijakan pemerintah menempatkan pengertian kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan demi langkah.

Dimensi politik menyebabkan kebijakan itu disebut sebagai kebijakan pemerintah dalam kebijakan politik. Menempatkan pengertian kebijakan politik sebagai suatu susunan dari *pertama*: tujuan-tujuan yang dipilih oleh aktor atau aktor-aktor untuk diri sendiri atau untuk suatu kelompok; *kedua*: jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya atau oleh mereka.

Dimensi sosiologi menempatkan kebijakan disebut sebagai kebijakan sosial yang menempatkan pengertian kebijakan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sarana dan tujuan. Namun dalam konteks sosial maka dimensinya mencakup aspek-aspek sosial yang sangat luas, dan oleh karena itu dapat dikatakan sebagai kebijakan dalam dimensi sosial dimana substansinya menyangkut suatu rencana aksi yang sangat aktual bersentuhan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam kaitanya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan secara generik atau pun spesifik. Dalam artian generik kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-

---

<sup>45</sup>Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm 15.

bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam masyarakat ataupun kolektifitas, dalam hal ini seperti pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. Dalam arti spesifik kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>46</sup>

#### 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dengan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm 19.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan;

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. Asas-asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan

---

<sup>47</sup> Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 37.



peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota.<sup>48</sup>

## C. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 yang berbunyi kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir di dasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial). Sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.<sup>49</sup>

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, yang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>50</sup>

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 39

<sup>49</sup>Garda Maeswara, *Biografi Politik Susilo Bambang Yodhoyono*, (Jakarta: Penerbit Narasi, 2009) hlm 246

<sup>50</sup>Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Multi Pressindo, 2008) hlm 166

kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal mendasar yang perlu di perhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus di capai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilih sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- c. Diberlakukan adanya rumus undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- d. Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang- undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya

---

<sup>51</sup>Indri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2008), hlm 111-112

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam akitivitasekonomi.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian.<sup>52</sup> oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

#### **D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator-indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat merupakan beberapa organisasi sosial dan merupakan beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckkerman membedakan indikator masyarakat dalam tigakelempok:<sup>5</sup>

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan

---

<sup>52</sup>Ali Imron, *Model Pembangunan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq*, (Malang: 2009), hlm. 44

perbedaan tingkat harga di setiap Negara.

- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersipat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

- a. BAPPENAS

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>53</sup>

- b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi untuk mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli

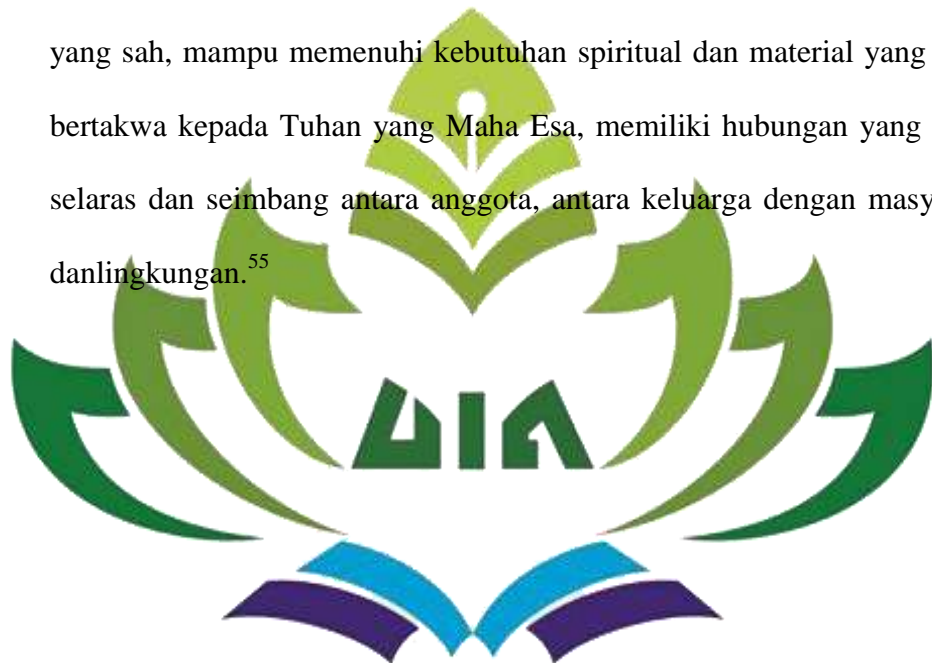
---

<sup>53</sup>Hendrik, "Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau", Jurnal Perikanan dan Kelautan, hlm 23, diakses 27 februari 2017

pakaian dalam satu tahun, frekuensi makan setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti kepemilikan kendaraan motor kredit atau non kredit, emas, ternak, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.<sup>54</sup>

c. BKKBN

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>55</sup>



---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 24

<sup>55</sup> Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta, PT. Renika Cipta, 2002), hlm 121

## E. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam

*Al-Falah* secara bahasa bermakna *Zhafarah bima yurid* (Kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>56</sup> Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun:1 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.*<sup>57</sup>”

Sedangkan menurut Syaikh Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *Al-falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka *falah* dapat diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan di dunia dan akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bias mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

<sup>56</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 2

<sup>57</sup> *Al-Quran*, QS. Al-Mu'minun: 1

<sup>58</sup> Syaikh Muhyiddin Qaradaghi, *AlFalah fi al Kitab wa as Sannah*. Diunduh tgl 7 maret 2017

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian :<sup>59</sup>

- 1) Kesejahteraan *holistic* dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat, jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi,

---

<sup>59</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 4

kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.<sup>60</sup>

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Tha ha ayat 117- 119:

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿١١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا

وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَمْوَسَىٰ

**Artinya:** "117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, 119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Q.S ThaaHaa. 117-119)<sup>61</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semua telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini

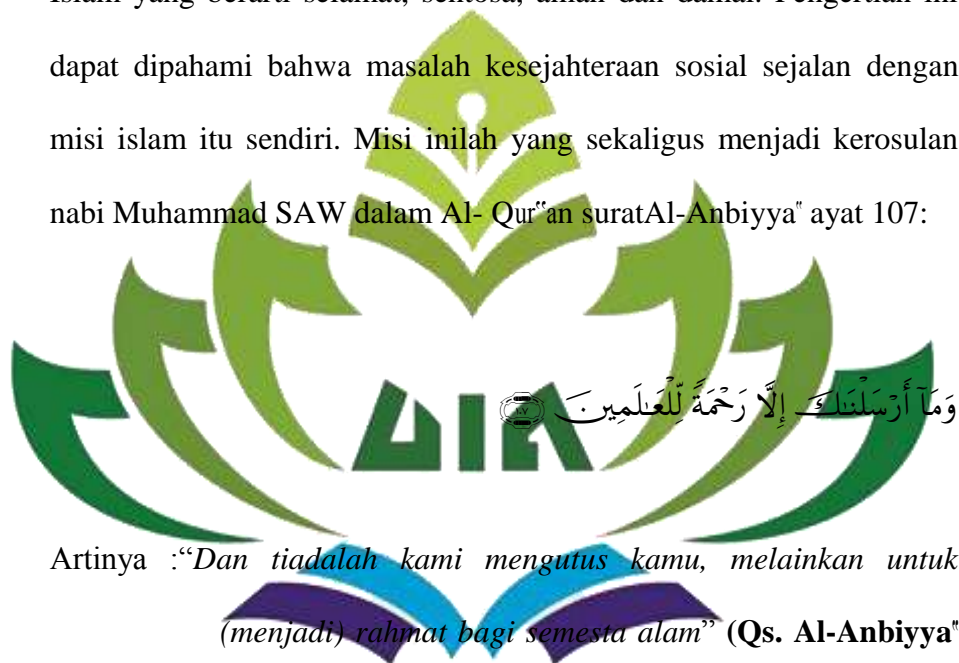
<sup>60</sup>Ibid, hlm 5

<sup>61</sup>Al-Qur'an, Q.S ThaaHaa. 117-119



merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama, dilihat dari pengertiannya sejahtera sebagaimana disebutkan dalam kamus besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi kerosulan nabi Muhammad SAW dalam Al- Qur'an surat Al-Anbiyya" ayat 107:



Artinya :“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Qs. Al-Anbiyya" ayat 107)<sup>62</sup>

Berdasarkan isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Seperti hubungan manusia dengan sang pencipta, manusia sebagai makhluk Allah SWT melakukan interaksi manusia dengan manusia dengan cara saling tolong menolong dan sebagainya.

<sup>62</sup>Al-Qur'an, Qs.Al-Anbiyya, 107

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam Islam adalah wajib dalam

jama'ah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.<sup>21</sup> Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antarmereka.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:<sup>63</sup>

- 1) *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran.
- 2) *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

---

<sup>63</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, terjemah, soeroyo, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), hlm 52

- 3) *Takaful* (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang

#### **F. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam**

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapus semua kesulitan, dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.<sup>64</sup> Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islami.<sup>65</sup>



---

<sup>64</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), hlm 62

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm 10

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spiritual yang satu sama lain saling membutuhkan antarlain:

a. Unsur Materi

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan di dunia ini secara wajar, islam memperbolehkan manusia untuk memanfaatkan dan batas-batas yang halal-Nya dan menjauhi yang haram. Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan itu seperti:

- 1) Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air danlain-lain.
- 2) Nikmat pakaian dan perhiasan.
- 3) Nikmat tempat tinggal.
- 4) Nikmat kendaraan.
- 5) Nikmat rumah tangga

b. Unsur spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

Indikator kesejahteraan menurut Islam menunjuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraysh ayat 3-4. Berdasarkan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

﴿خَوْفٍ مِّنْ وَّاءٍ مِّنْهُمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي-الْبَيْتِ هَذَا رَبِّ فَلْيَعْبُدُوا﴾

Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Qs. Al-Quraysh" ayat 107)<sup>66</sup>

Dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan iman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.S An-Nahl ayat 97)

Jika Allah Swt di ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang perintahNya kepada orang yang beriman untuk bersabar dalam menjalankan ibadah, baik yang bersifat wajib, sunnah, atau mubah, maka pada ayat ini Allah Swt menegaskan kepada orang

<sup>66</sup>Al-Qur'an, Qs. Al-Anbiyya" 107

mukmin untuk menjalankan setiap ajaran Islam. Begitu kurang lebih keterangan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, *Al-Munir*.

Dari redaksi surat an-Nahl Ayat 97 ini, sebagaimana terbaca dalam terjemah di atas, berbuat baik adalah kewajiban setiap manusia, apapun jenis kelaminnya. Jika amal baik yang mereka kerjakan itu juga disertai keimanan, maka mereka layak mendapat “*hayatan thayyibah*”. Apa itu *hayatan thayyibah*?

Secara bahasa, *hayatan thayyibah* dapat diartikan “kehidupan yang baik”. Lantas, bisa jadi akan ada yang bertanya, bentuk dari kehidupan yang baik itu apa? Para ulama telah menguraikannya dengan panjang lebar.

Namun, dalam hal ini, ada baiknya jika kita melirik penafsiran al-Mawardi. Ia menyebutkan dalam tafsirnya, *al-Nukat wa al-'Uyun*, bahwa kehidupan yang baik memiliki sejumlah penafsiran, yaitu:

### **1. Rizki yang Halal**

Mencari rizki yang halal adalah kewajiban setiap orang yang beriman. Rizki yang halal sangat menentukan kualitas ibadah seseorang. Tidak mungkin rajin dalam beribadah kepada Allah Swt, seorang yang memakan makanan yang haram. Tak mungkin dekat dengan Allah Swt orang yang di dalam tubuhnya tersimpan suatu yang haram. Dengan beriman dan beramal saleh, seseorang akan diarahkan untuk mendapatkan rizki yang halal. Atau bisa jadi, orang yang beriman dan beramal baik tak akan mungkin mau mencari rizki yang tidak halal.

## 2. Qana'ah

Qana'ah, secara bahasa, berarti ridla dengan setiap pemberian. Namun secara istilah adalah tetap tenang di saat tidak adanya hal yang biasanya ada. Demikian penjelasan dalam *Mu'jam al-Jurjani*. Orang yang qana'ah tidak akan berkecil hati manakala kebutuhannya tidak atau belum tercukupi. Ia sadar betul bahwa ketiadaan sesuatu itu juga merupakan pemberian dari Allah Swt yang harus disyukuri.

## 3. Beriman dan Taat

Orang yang diberi kehidupan yang baik berarti orang itu selalu beriman dan melakukan perintah Allah Swt. Bagi setiap muslim, tak ada perbuatan yang paling baik dan layak dilakukan selain mengerjakan segala hal yang Allah Swt. perintahkan dan ridlai. Bisa jadi, orang beriman dan berbuat baik, tidak banyak memiliki harta (miskin). Namun bagi mereka, bisa beriman dan taat ibadah itu adalah segalanya dan luar biasa.

## 4. Keberuntungan

Adalah harapan setiap orang menjadi orang yang beruntung. Tidak hanya urusan dunia, namun juga ukhrawi. Keberuntungan adalah satu keadaan yang tidak semua orang memilikinya. Sungguh, mereka yang mendapat keberuntungan adalah yang paling bahagia.

## 5. Surga

Siapa yang tak ingin masuk surga? Surga menjadi tempat dambaan setiap manusia. Dengan segala kelengkapan fasilitasnya, manusia akan

bisa hidup dengan tenang di sana. Dan ini akan diberikan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik.

## 6. Kesehatan dan Kecukupan

Hanya orang sakit yang mengerti arti sebuah kesehatan. Hanya orang yang serba kekurangan yang akan selalu rindu dengan kecukupan. Kesehatan dan kecukupan adaah dua hal yang diinginkan setiap manusia. Ketika keduanya dimiliki, maka seseorang akan hidup bagai raja.

## 7. Ridla terhadap Qadla

Al-Jurjani menjelaskan, qadla adalah suatu ungkapan bagi hukum yang menyeluruh (*al-kulli*) dan tentang ketuhanan (*al-ilahi*) bagi setiap hal yang wujud terhadap keadaan yang terjadi dari zaman azali sampai selamanya. Dari definisi itu, dapat diartikan bahwa qadla adalah segala ketetapan yang telah diatur Allah bagi setiap makhluk. Meridlai qadla adalah salah satu inti dari kehidupan. Jika seseorang ridla dengan qadla, akan Allah juga akan ridla terhadapnya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, indikator kesejahteraan masyarakat menurut islam yaitu mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan membangun tauhid, sehingga sebelum sejahteranya masyarakat secara fisik, maka yang paling utama dari masyarakat adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang pencipta.

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram di masyarakat adalah salah satu dari indikator kesejahteraan masyarakat menurut islam. Jika masih banyak



tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan dan kriminal lainnya, maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

## G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi pebandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian:

1. Abu Huraerah dengan judul “Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Pemecahan masalah kemiskinan ini dilakukan melalui pendekatan multi dimensi. Hasil penelitian dan analisis dari Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah kemiskinan dituntut memiliki komitmen yang kuat, dan pelaksanaan komitmen tersebut perlu menerapkan strategi yang didukung pendekatan multi disiplin. Masyarakat harus dipandang lebih sebagai subyek daripada obyek, dan mereka harus diberi kesempatan mewarnai kebijakan dan strategi penanggulangan

kemiskinan. Pemerintah tidak boleh mendominasi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penanggulangan kemiskinan, melainkan hanya sebagai fasilitator, sehingga strategi dan pendekatan penanggulangan kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.<sup>67</sup>

2. Sri Kusriyah, Dina Aulia dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak”. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategis kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Kabupaten Demak masih sangat minim karena baru di tahun 2013 sedang dilakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Kabupaten

---

<sup>67</sup> Abu Huraerah, Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2013)

Demak adalah kurangnya regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan dan minimnya APBD.<sup>68</sup>

3. Ihdal Husnayain, Dr. Effendi hasan, MA dengan judul “Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara terbuka. Hasil dari penelitian analisis dari Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah Pemerintah Aceh lakukan adalah program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), Pembangunan Rumah Dhuafa, Beasiswa Pendidikan, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemerintah Aceh adalah keberagaman SOP, SDM yang kurang bertanggungjawab, serta kurangnya pengawasan kegiatan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sri Kusriyah, Dina Aulia, Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015*

<sup>69</sup> Ihdal Husnayain, Effendi hasan, Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2. 68-79 Juli-Agustus 2019*

4. Merlian Yulistriani dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara mendalam dengan beberapa responden inti. Hasil analisis dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui peningkatan derajat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>70</sup>

5. Nurul Istiqomah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Peternak Kambing Kaligesing Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kepada petani kambing Kaligesing yang tergabung dalam kelompok ternak kambing Kaligesing. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari implementasi peran Pemerintah kepada kelompok tani kambing Kaligesing belum maksimal dalam meningkatkan produktivitas ternak secara efektif, hal itu dikarenakan sulitnya

---

<sup>70</sup> Merlian Yulistriani, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)*, Fakultas Syariah, IAIN, Syekh Nurjati Cirebon, 2013

mengubah pola pikir para peternak dan kurangnya bimbingan karena perkembangan teknis ternak bisnis.<sup>71</sup>

6. Kevin Kumaa, Johannis Kawoan, Marlien Lopian dengan judul “Kebijakan pemerintah Desa Dalam pemberdayaan Kelompok Peternak Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten. Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok peternak berhenti beroperasi.<sup>72</sup>

7. Yuni Catur wulan, Nurul umi Ati, Roni Pindahanto Widodo dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota

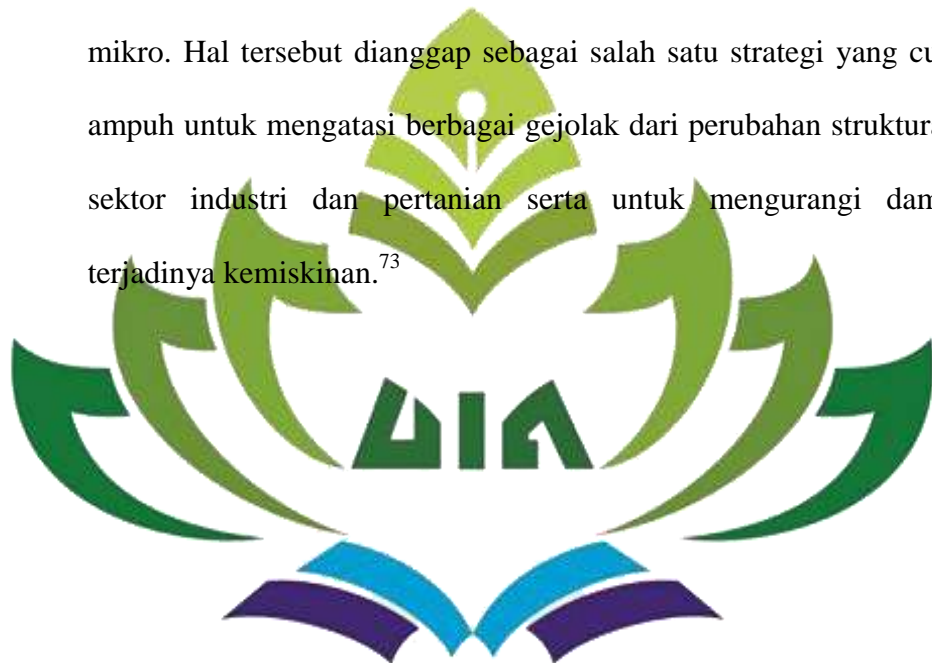
---

<sup>71</sup> Nurul Istiqomah , *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Peternak Kambing Kaligesing Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang, 2014

<sup>72</sup>Kevin Kumaa, dkk, *Kebijakan pemerintah Desa Dalam pemberdayaan Kelompok Peternak Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Probolinggo, Jawa Timur". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi.

Berdasarkan hasil analisis dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUBE salah satu strategi kementerian sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan keuangan mikro. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai gejolak dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta untuk mengurangi dampak terjadinya kemiskinan.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup>Yuni Catur wulan, dkk, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur*, Jurnal Respon Publik , Volume 13, No. 4, Tahun 2019, hlm 104-109

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2013, *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 1
- Adiwarman A. Karim, 2012, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Afzalur Rahman, 2000, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Dana Bakti Wakaf, terjemah, soeroyo*, Jakarta
- Ali Imron, 2009, *Model Pembangunan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq*, Malang
- Anwar Abbas, 2008, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta, Multi Pressindo
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, “ *Kabupaten Tanggamus Dalam Angka (TDA) Tahun 2015*” Tanggamus, Lampung
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, Jakarta, Gramedia
- Fariied Ali dan Andi Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, Refika Aditama
- Fariied Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm 15.
- Garda Maeswara, 2009, *Biografi Politik Susilo Bambang Yodhoyono*, Jakarta, Penerbit Narasi
- George Steinner, Jhon Minner, 2002, *Manajemen Stratejik*, Jakarta, Erlangga
- Hadi Sutrisno, 2002, *Metode Research*, Yogyakarta, UGM
- Halim, Abdul. 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta, Salemba Empat
- Hendrik, 2017, “*Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau*”, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993, *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Husein Umar, 2001, *Strategi Manajemen in Action*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

- Husein Umar, 2003, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Ihdal Husnayain, Effendi hasan, 2019, *Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2*
- Imron, Ali, 2002, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indri dan Titik Triwulan Tutik, 2008, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Inu kencana syafie & welasari, 2015, *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F, 1989, *Manajemen Dan Strategi Kebijakan Perusahaan*. Jakarta, Erlangga
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)* <http://www.kbbi.web.id/usaha>, 30 Januari 2020
- Kevin Kumaa, dkk, 2018, *Kebijakan pemerintah Desa Dalam pemberdayaan Kelompok Peternak Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder*, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1*
- Koentjoroningrat, 2001, *“Metodologi Penelitian Masyarakat”*, Jakarta, Gramedia
- Merlian Yulistriani, 2013, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)*, Fakultas Syariah, IAIN, Syekh Nurjati Cirebon
- Moh. Pabundu Tika, 2006 *Metode Riset Bisnis*, Jakarta, Bumi Aksara
- Nurul Istiqomah , *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Peternak Kambing Kaligesing Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang, 2014
- Peter salim dan yeni salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta, Modern Press
- Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta, PT. Renika Cipta, 2002), hlm 121
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) , 2013, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali



- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2015 *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Rudi Badrudin, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta ,UPP STIN YKPN,
- Rulam Ahmadi, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia*, *Jurnal Administrasi Publik* , Vol. 10, No. 2
- Siagian, Sondang P, 2004, *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siswanto Sunarto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Kusriyah, Dina Aulia, 2015, Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2*
- Sugiono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfa Beta
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta, Bina Aksara
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta
- Syaikh Muhyiddin Qaradaghi, *AlFalah fi al Kitab wa as Sannah*. Diunduh tgl 7 maret 2017
- Yuni Catur wulan, dkk, 2019 *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur*, *Jurnal Respon Publik* , Volume 13, No. 4